

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pembangunan Desa Waimatakabo

###### 1. Pembangunan Desa Secara Terpadu

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Waimatakabo pada tahun anggaran 2015 menurut Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif bahwa anggaran Dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. Rp 257.572.000. Dana Desa tersebut tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Waimatakabo, melainkan secara bertahap (3 tahap). Adapun tahapan dalam penerimaan Anggaran Dana Desa Waimatakabo yaitu:

**Tabel 3. 1**  
**Besaran Penerimaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Tahapan**

No	Tahap ke	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1	Tahap ke – 1	40%	103.028.800,00,
2	Tahap ke – 2	40%	103.028.800,00,
3	Tahap ke – 3	20%	51.514.400,00
Jumlah		100%	257.572.000,00

*Sumber: ArsipAPBDes Pemerintah Desa Waimatakabo tahun 2015*

Dana Desa sebesar Rp. 257.572.000,- tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian

dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa dan kegiatan operasional perangkat Desa.

Asep Aidin dalam wawancara 9 Mei 2017 menyatakan bahwa: “peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo adalah sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan”.<sup>1</sup>

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat didalam pembangunan, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dituturkan oleh Asep Aidin selaku Kepala Urusan Program Pembangunan Desa Waimatakabo. Hal ini dilakukan karena pembangunan Desa Waimatakabo dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong sesuai dengan visi dari Desa Waimatakabo yang dengan semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif.

Pembangunan secara gotong-royong adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok rukun tetangga (RT) atau kelompok Dusun yang ada di Desa Waimatakabo. Mengingat alokasi dana Desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan, maka semangat kegotong-royongan selalu ditunjukkan oleh

---

<sup>1</sup> Asep Aidin Kaur Pembangunan Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 9 Mei tahun 2017.

masyarakat Desa Waimatakabo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tahun 2015.

Pembangunan infrastruktur secara gotong-royong merupakan sebuah prinsip pembangunan yang ada didalam masyarakat pedesaan karena, masyarakat Desa masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong. Pembangunan secara gotong-royong secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat di sebuah rukun tetangga (RT) dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo pada tahun 2015 dilakukan secara terpadu pada tingkat Dusun ataupun rukun tetangga, dan dilakukan secara gotong-royong.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Waimatakabo adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo secara bersamaan dan dilakukan secara serentak di sebuah rukun tetangga maupun Dusun. Pembangunan infrastruktur dilakukan Desa Waimatakabo secara serentak bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan waktu yang sama, sehingga Pemerintah Desa Waimatakabo dapat dengan mudah melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya.

Pembangunan secara serentak sengaja dilakukan agar tidak terjadi penutupan akses fasilitas publik yang mengganggu kegiatan dari masyarakat Desa Waimatakabo, selain itu tujuan dari pembangunan infrastruktur secara

terpadu dengan gotong-royong untuk pengefektifan dan pengefisiensian biaya, mengingat pembangunan Desa Waimatakabo terbagi atas beberapa titik pembangunan yang berbeda setiap wilayahnya, baik itu wilayah Rukun Tetangga ataupun wilayah Dusun. Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Waimatakabo dalam membagi dana Desa, sehingga menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gotong-royong. Adapun jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo pada tahun 2015 adalah:

**Tabel 3. 2**  
**Jenis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Jalan desa 1200 m	Dusun I RT 2
2	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun II RT 3
3	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun II RT 4
4	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun III RT 5
5	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun III RT 6
6	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun IV RT 7
7	Pembangunan Gorong-Gorong 1 unit	Dusun IV RT 8

*Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Waimatakabo tahun 2015*

Dari uraian tabel tersebut di atas pembangunan dan titik lokasi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Waimatakabo, dapat diketahui beberapa lokasi dan jenis pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur setiap Dusun

maupun rukun tetangga (RT) mencakup pembelian bahan bangunan yang digunakan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Waimatakabo mendapatkan monitoring oleh penyelenggara pembangunan infrastruktur Desa. Monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu, monitoring bertujuan untuk melihat tenaga kerja yang digunakan oleh sebuah Rukun Tetangga (RT) atau Dusun dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau tidak.

## **2. Pembangunan Sebagai Suatu Proses, Metode, Program dan Sebagai Gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya).**

Pembangunan sebagai metode merupakan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan dari masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat Desa Waimatakabo dalam melakukan pembangunan infrastruktur meletakkan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan Desa. Kemampuan masyarakat Desa Waimatakabo diawali dengan penyusunan kebutuhan pembangunan yang diperlukan, dan dilanjutkan dengan pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa.

Kemampuan masyarakat dalam menyusun kebutuhan pembangunan atau rencana pembangunan dilakukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan digunakan dalam sebuah pembangunan tersebut, sehingga dalam hal perencanaan ini membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang.

Besaran dan volume pembangunan menentukan besarnya anggaran dana yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan infrastruktur. Anggaran dana yang telah disusun oleh masyarakat dapat memperkirakan target pekerjaan yang akan diselesaikan dalam sebuah pembangunan sekaligus dapat memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pembangunan, masyarakat harus menyusun dokumen tersebut dengan perencanaan yang matang, hal ini membutuhkan kemampuan yang baik dari masyarakat dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

Asep Aidin dalam wawancara 9 Mei 2017 menuturkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Waimatakabo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan anggaran dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa. Penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat berdasarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk menyusun kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga nantinya pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tentunya tidak lepas dari peran masyarakat Desa, dimana masyarakat adalah pelaksana utama dari sebuah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur

---

<sup>2</sup> Asep Aidin Kaur Pembangunan Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 9 Mei tahun 2017.

yang ada di wilayah Desa Waimatakabo mendasarkan pembangunan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pekerja utama dari sebuah pembangunan adalah masyarakat Desa itu sendiri.

**Tabel 3. 3**  
**Jumlah Penduduk Pelaksana Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Dusun	Laki-laki	Jenis Pembangunan
1	Dusun I	230	Pembangunan Jalan desa 1200 m
2	Dusun II	179	Pembangunan Gorong-Gorong 2 unit
3	Dusun III	157	Pembangunan Gorong-Gorong 2 unit
4	Dusun IV	169	Pembangunan Gorong-Gorong 2 unit

*Sumber: Profil Desa dan Monografi Desa Waimatakabo Semester I, Bulan Januari Tahun 2015.*

Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Waimatakabo tidak lepas dari penduduk sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur, dimana pelaksana pembangunan infrastruktur terdiri dari warga Desa Waimatakabo yang berjenis kelamin laki-laki yang dianggap mampu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Waimatakabo yang memiliki 4 Dusun serta memiliki kemampuan dan sumber daya manusia yang dapat dikatakan beragam dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Waimatakabo selalu memperhatikan kemampuan dan sumber

daya manusia yang dimiliki disetiap wilayah Rukun Tetangga (RT) ataupun Dusun.

**Tabel 3. 4**  
**Struktur Usia Pelaksana Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Struktur Usia (Umur)	Laki-laki
1	Remaja (20-24) Tahun	85
2	Dewasa (25-29) Tahun	120
3	Dewasa (30-39) Tahun	102
4	Tua (50-59) Tahun	70
TOTAL		377

*Sumber: Profil Desa dan Monografi Desa Waimatakabo Semester II.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia produktif (remaja-tua) merupakan pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo mencapai 377 jiwa. Jumlah usia produktif pelaksana pembangunan tersebut tentunya terbagi atas masing-masing wilayah Dusun, sehingga Dusun memperkirakan dengan sendirinya berapa banyak usia produktif yang dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur. Usia produktif sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur mempunyai kemampuan tenaga dan sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo, sehingga pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki pada wilayah Rukun Tetangga (RT) ataupun Dusun masing-masing.

Pembangunan infrastruktur atas dasar kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat dapat menghasilkan pembangunan



yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat tersebut. Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kinerja masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Kinerja masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara gotong-royong sangat memperhatikan kemampuan dan sumber daya manusia dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

### **3. Sasaran Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015**

Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses hasil panennya, selain itu pembangunan Desa Waimatakabo bertujuan sebagai pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat Desa, karena kemajuan pembangunan di tingkat Desa adalah sebuah tolok ukur kemajuan Negara. Masyarakat dengan tingkat pembangunan Desa yang tinggi merupakan masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang mempunyai orientasi kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur yang baik untuk meratakan pembangunan infrastrukturnya. Hal ini adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses hasil panennya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur secara merata yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Waimatakabo di wilayahnya menunjukkan bahwa pemerintah Desa Waimatakabo mampu menggunakan Dana Desa yang

diterima dari APBN melalui transfer APBD. Sehingga hasil pembangunan tersebut yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat masyarakat Desa Waimatakabo.

Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo pada tahun 2015 dilaksanakan secara 3 tahap, yaitu pada bulan April, Agustus dan Oktober. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara 3 tahap karena penyesuaian penerimaan dari alokasi dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Waimatakabo, mengingat bahwa alokasi Dana Desa dibagi menjadi 3 tahap. Dana yang terima pada setiap pembangunan dititik atau lokasi pembangunan berbeda-beda, sesuai dengan besaran dan volume pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap titik pembangunannya. Selain itu, pembangunan pada Desa Waimatakabo dilakukan secara serentak pada setiap tahap pembangunan infrastruktur. Adapun jenis pembangunan infrastruktur dan rincian anggaran dananya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Anggaran
1	Pembangunan Jalan desa 1200 m	Rp. 140.480.000
2	Pembangunan Gorong-Gorong	Rp. 99.842.000
Jumlah		Rp. 240.322.000

*Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Waimatakabo Tahun 2015*

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jenis pembangunan dan anggaran dana untuk sebuah pembangunan. Jenis pembangunan infrastruktur dan anggaran dana tersebut tentunya tidak digunakan pada satu titik pembangunan saja, melainkan pada titik dan lokasi yang berbeda pada setiap wilayah Dusun yang ada di Desa Waimatakabo. Kesamaan jenis pembangunan yang ada dikarenakan oleh fasilitas yang ada di wilayah tingkat Dusun ataupun Rukun Tetangga (RT) kurang memadai dan bahkan tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur. Jenis pembangunan ini tentunya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Waimatakabo sendiri.

Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tahun 2015 didominasi untuk pembangunan jalan desa 1.200 m dengan anggaran Rp. 140.480.000,-, pembangunan jalan tersebut hanya terfokus pada satu titik yakni di Dusun I. Pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Dusun I tersebut telah ditentukan volume dan panjang jalan yang akan realisasikan, sehingga anggaran untuk pembangunan jalan desa dari Pemerintah Desa dapat ditetapkan. Pembangunan yang dilaksanakan di Dusun I tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, tentunya dengan kemampuan dan sumber daya yang miliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pembangunan yang menjadi prioritas pada Desa Waimatakabo selanjutnya adalah pembangunan gorong-gorong yakni pada tiga yang

lainnya, antara lain Dusun II sebanyak dua (2) unit, Dusun III sebanyak dua (2) unit, dan berikutnya adalah Dusun IV sebanyak dua unit, dengan anggaran sebesar 99.842.000,-, pembangunan gorong-gorong ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, pembangunan ini tidak terfokus pada satu titik saja, melainkan pada berbagai titik yang ada di wilayah Desa Waimatakabo. Pembangunan gorong-gorong pada wilayah Dusun tersebut berfungsi sebagai tempat jalannya air.

Sasaran pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo yang tidak lain untuk meratakan pembangunan di setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun mempunyai jenis pembangunan yang sama pada wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penerimaan Dana Desa 2015 dari APBN. Jenis pembangunan infrastruktur pada setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun yang satu dengan yang lainnya memiliki persamaan karena pada Rukun Tetangga (RT) atau Dusun tersebut mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama, mengingat Desa Waimatakabo terbagi atas kondisi dan keadaan wilayah yang hampir mempunyai kesamaan. Persamaan jenis pembangunan infrastruktur memudahkan Pemerintah Desa Waimatakabo dalam membentuk prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015, dimana prioritas pembangunan ini adalah pembangunan yang diutamakan, sebab rincian dari sebuah pembangunan infrastruktur memiliki kesamaan. Adapun jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Jenis Pembangunan, Lokasi, Volume, dan Anggaran Dana Pembangunan**  
**Infrastruktur Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran Dana
1	Pembangunan Jalan	Dusun I RT 02	1200 m	Rp. 140.480.000
2	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun II RT 03	1 unit	Rp. 16.641.300
3	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun II RT 04	1 unit	Rp. 16.641.300
4	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun III RT 05	1 unit	Rp. 16.641.300
5	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun III RT 06	1 unit	Rp. 16.641.300
6	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun IV RT 07	1 unit	Rp. 16.641.300
7	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun IV RT 08	1 unit	Rp. 16.641.300
Jumlah				Rp. 240.322.000

*Sumber: Dokumen Data Kegiatan Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemabangunan yang paling dominan adalah pembangunan jalan Desa, dan pembangunan gorong-gorong. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Waimatakabo, mengingat jalan antar Rukun Tentang (RT) dan antar Dusun adalah jalan yang berupa tanah, sehingga jika musim penghujan tiba, jalan tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan karena tergenang oleh air serta licin.

Asep Aidin dalam wawancara 9 Mei 2017 menuturkan bahwa pembangunan pada tahun 2015 dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh

masyarakat setempat, sehingga nantinya pembangunan yang ada di Desa waimatakabo dapat berkelanjutan dan merata pada setiap Dusun bahkan Rukun Tetangga (RT). Jumlah alokasi dana Desa yang diperoleh Desa Waimatakabo melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2015 sebanyak Rp. 277.572.000,-, diambil (Rp. 240.322.000,-) untuk pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo.<sup>3</sup>

Selain itu Asep Aidin dalam wawancaranya pada 9 Mei 2017 juga menuturkan bahwa pembangunan pada tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan volume pembangunan yang berbeda, sesuai dengan kondisi wilayah yang akan dilakukan pembangunan.<sup>4</sup>

## **B. Evaluasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa**

### **Waimatakabo tahun 2015**

#### **1. Asesmen Kebutuhan**

Asesmen kebutuhan (*need assessment*) bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan serta diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Asesmen kebutuhan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan pembangunan, cara yang digunakan dalam asesmen kebutuhan tersebut adalah melihat kondisi ataupun keadaan wilayah masyarakat yang menginginkan pembangunan, kondisi dan keadaan wilayah masyarakat itulah yang nantinya akan menjadi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Asesmen kebutuhan ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pengukuran kebutuhan masyarakat

---

<sup>3</sup> Asep Aidin Kaur Pembangunan Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 9 Mei tahun 2017.

<sup>4</sup> Ibid. Pada tanggal 9 Mei tahun 2017.

melalui mendasarkan kondisi dan keadaan wilayah masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, jika pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayahnya, maka pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo sangat penting untuk dilakukan atau dilaksanakan, mengingat Desa Waimatakabo merupakan salah satu desa yang menjadi lumbung pangan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) serta menjadi icon seseorang dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan sebuah Desa dan Kabupaten. Desa Waimatakabo mempunyai wilayah dengan jenis wilayah yang berbeda-beda, dimulai dengan wilayah yang banyak penduduk, dan wilayah dengan penduduknya yang sedikit. Hal ini tentunya mempengaruhi pembangunan yang ada di Desa Waimatakabo, wilayah dengan penduduk yang banyak akan sangat cepat menentukan kebutuhan pembangunan di wilayahnya, sedangkan pada wilayah yang memiliki penduduk sedikit lebih lama menentukan kebutuhan pada wilayahnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Waimatakabo menggunakan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dari transfer APBD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bertujuan untuk pemerataan pembangunan sesuai dengan tujuan Dana Desa yang terdapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Keberadaan infrastruktur di Desa Waimatakabo sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur selalu digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari pembangunan jalan desa hingga gorong-gorong. Pembangunan yang dominan di Desa Waimatakabo adalah pembangunan jalan desa, hal ini dikarenakan wilayah Desa Waimatakabo adalah wilayah dengan jalan tanah atau jalan sertu. Jalan tanah atau jalan sertu adalah jalan yang menghubungkan antar Dusun serta Rukun Tetangga (RT) satu dengan yang lainnya. Infrastruktur jalan desa di Desa Waimatakabo tentunya membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, jika jalan desa dirasakan sulit digunakan, maka masyarakat dapat melakukan perbaikan jalan desa melalui pembangunan infrastruktur melalui pemerintah Desa Waimatakabo.

Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo dimulai dengan melihat kondisi dan keadaan wilayah masyarakat pada masing-masing Dusun dan Rukun Tetangga (RT), kondisi serta keadaan wilayah yang akan menjadi penentu kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap Dusun atau Rukun Tetangga (RT). Kondisi dan keadaan wilayah yang ada pada masing-masing Rukun Tetangga nantinya akan membentuk kebutuhan pembangunan pada setiap Rukun Tetangga (RT). Hal ini sangat



diperlukan karena yang memahami dan membutuhkan serta memerlukan pembangunan adalah masyarakat sendiri.

Mujiono dalam wawancara 10 Mei 2017 mengatakan bahwa: “pembangunan yang ada di Desa Waimatakabo melibatkan seluruh lapisan masyarakat. masyarakat yang ada pada cakupan Rukun Tetangga (RT) diberikan kewenangan menyusun target pemabngunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa Waimatakabo melalui Kepala Dusun. Target pemabangunan yang disusun oleh setiap Rukun Tetangga (RT) tidak semuanya diajukan ke Pemerintah Desa Waimatakabo, melainkan disortir untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan terlebih dahulu, pembangunan lainnya yang belum terlaksana dapat dijadikan prioritas pembangunan pada tahap atau tahun berikutnya”.<sup>5</sup>

Desa Waimatakabo dengan wilayah yang luas dan memiliki kontur wilayah serta lapisan masyarakat yang berbeda-beda tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo diberikan langsung kepada para kepala Dusun. Peran kepala Dusun dalam pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting, sebab keberadaan kepala Dusun paling dekat dengan masyarakat, mengingat Desa Waimatakabo masih menggunakan Rukun Tetangga (RT) dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Dusun ditugaskan untuk menyaring pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di wilayahnya. Dalam hal ini, kepala Dusun diminta untuk menyaring informasi mengenai kondisi serta keadaan masyarakat yang berada di

---

<sup>5</sup> Mujiono Kepala Dusun IV Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei tahun 2017.

wilayahnya melalui ketua Rukun Tetangga (RT), mengingat Dusun yang berada di Desa Waimatakabo terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing Rukun Tetangga (RT) memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berbeda-beda.

Garis koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa, Kepala Dusun serta Kepala Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Waimatakabo membentuk suatu komunikasi yang baik antar pemerintah Desa dan masyarakat yang berada di wilayah Desa Waimatakabo. Koordinasi yang baik secara tidak langsung menimbulkan komunikasi yang baik juga, sehingga dengan adanya koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT) maka kondisi serta keadaan masyarakat yang ada pada tahun 2015 dapat dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tahun 2015. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi serta keadaan di wilayah setempat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Kondisi dan keadaan masyarakat Desa Waimatakabo selanjutnya membentuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang ada dimasyarakat Desa Waimatakabo harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri karena pengguna dari fasilitas pembangunan infrastruktur adalah masyarakat yang berada di wilayah

tersebut. Kebutuhan masyarakat Desa Waimatakabo dalam hal pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kondisi dan keadaan wilayahnya, dimana kondisi dan keadaan wilayah tersebut menjadi penentu pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap Dusun atau Rukun Tetangga (RT). Tidak lepas dari koordinasi yang ada pada setiap Rukun Tetangga (RT) disebuah Dusun, setiap Rukun Tetangga (RT) di wilayah Desa Waimatakabo menyaring apa saja kebutuhan pembangunan yang perlu dilakukan pada tahun 2015, kebutuhan pembangunan tersebut tentunya dengan melihat kondisi dan keadaan wilayahnya.

**Tabel 3. 7**  
**Jumlah Usulan dan Penerimaan Pembangunan Infrastruktur**

No	Dusun	Jumlah Usulan	Penerimaan Usulan
1	Dusun I	2	1
2	Dusun II	3	2
3	Dusun III	3	2
4	Dusun IV	3	2

*Sumber: Rencana Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015*

Andik dalam wawancara 10 Mei 2017 menyatakan bahwa: “setiap ada pembangunan yang sumbernya berasal dari Desa, warga selalu dilibatkan melalui musyawarah atau rapat disetiap Rukun Tetangga (RT), sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan mendasarkan kondisi dan keadaan yang ada diwilayah kami, jadi kalau pembangunan yang menyusun adalah masyarakat sendiri nanti akan sesuai sama apa yang ada dimasyarakat, dan pembangunannya tidak salah sasaran. Biasanya pembangunan yang diusulkan oleh warga didengar dengan Pak Rukun Tetangga (RT), Pak Dusun dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andik Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei tahun 2017.

Karsun dalam wawancara 10 Mei 2017 mengatakan bahwa: “pembangunan yang kami usulkan biasanya diterima dan ditindaklanjuti, jika dibentuk skala penerimaan, usulan yang diterima hampir sebesar 80%”.<sup>7</sup>

Masyarakat Desa Waimatakabo merupakan perencana pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang menyusun rencana pembangunan diwilayah masing-masing. Rencana pembangunan infrastruktur yang disusun oleh tingkat Rukun Tetangga (RT) lalu diberikan kepada tingkat Dusun dan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Waimatakabo melakukan musyawarah untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan setelah ada pemberitahuan dari Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya dilaksanakan pada pertemuan Rukun Tetangga (RT), dari musyawarah pada tingkat Rukun Tetangga (RT) yang melibatkan seluruh masyarakat yang berada dilingkup Rukun Tetangga (RT), maka akan membentuk suatu kebutuhan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, tentunya didasari dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing, hal ini seperti hasil wawancara dengan Andik pada 10 Mei 2017 selaku masyarakat Desa Waimatakabo.

---

<sup>7</sup> Karsun Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei tahun 2017.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam kebutuhan pembangunan infrastruktur didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini dapat diartikan bahwa usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat Desa Waimatakabo didengar dan diterima oleh Pemerintah Desa, seperti yang diungkapkan oleh Karsun pada wawancara 10 Mei 2017 selaku masyarakat Desa Waimatakabo yang mengatakan bahwa aspirasi dan usulan pembangunan infrastruktur diserap sebesar hampir 80%.

Ketua Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas untuk menyaring kebutuhan pembangunan di wilayahnya sendiri yang diperoleh melalui musyawarah bersama warga, selanjutnya membuat daftar atau list kebutuhan pembangunan. kebutuhan pembangunan dilakukan dengan cara melibatkan seluruh masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengadakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing, sehingga pembangunan yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Setelah daftar atau list pembangunan tersebut telah selesai, kemudian Ketua Rukun Tetangga (RT) memberikan hasilnya kepada Kepala Dusun saat musyawarah bersama tingkat Dusun, hal ini dilakukan setiap awal bulan diakhir tahun.

Musyawarah bersama tingkat Dusun menghasilkan prioritas pembangunan disetiap Dusun, dimana nantinya akan menghasilkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan yang telah disusun oleh masyarakat pada tingkat paling bawah yakni Rukun Tetangga (RT) tidak dilakukan semua pada satu tahap pembangunan karena dana Desa diterima secara bertahap. Prioritas pembangunan yaitu pembangunan yang diutamakan, mengingat Desa Waimatakabo memiliki 8 Rukun Tetangga (RT) yang semuanya membutuhkan pembangunan infrastruktur.

**Tabel 3. 8**

**Kondisi Wilayah dan Jenis Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Dusun	Keadaan Wilayah	Jenis Pembangunan
1	Dusun I	Tanah Datar, Persawahan, Perkebunan, Peternakan, Pemukiman	Fasilitas Jalan Desa
2	Dusun II	Tanah Datar, Persawahan, Pemukiman	2 Unit Gorong-Gorong
3	Dusun III	Tanah Datar, Perkebunan, Peternakan, Pemukiman	2 Unit Gorong-Gorong
4	Dusun IV	Tanah Datar, Pemukiman, Persawahan.	2 Unit Gorong-Gorong

*Sumber: Profil Desa Waimatakabo dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015*

Dari tabel kondisi wilayah dan jenis pembangunan Desa Waimatakabo dapat diketahui bahwa kondisi wilayah sangat mempengaruhi jenis pembangunan yang dilaksanakan, seperti pada Dusun yang memiliki

keadaan wilayah dengan dominan penduduk, dan lahan persawahan, maka dilakukan pembangunan jalan desa. Dusun dengan wilayah yang dominan akan perkebunan dilakukan pembangunan gorong-gorong. Jenis pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo pada tahun 2015 ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Desa Waimatakabo, jenis pembangunan infrastruktur tersebut selanjutnya membentuk kebutuhan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Waimatakabo dengan prioritas pembangunan.

Alokasi Dana Desa Waimatakabo tahun 2015 yang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, maka meningkatkan jumlah pembangunan infrastruktur pada tingkat Rukun Tetangga (RT) yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tingkat Rukun Tetangga (RT) ini mengharuskan kepada Dusun membentuk suatu prioritas pembangunan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Dusun masing-masing.

## **2. Evaluasi Proses Pembangunan**

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan serta mengontrol pelaksanaan pembangunan. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi proses pembangunan didalam pembahasan penelitian ini yakni: pelaksanaan pembangunan serta kinerja pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat Desa Waimatakabo merupakan masyarakat yang masih sangat kental dengan jiwa gotong-royongannya, dimana setiap kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat selalu dilakukan dengan cara gotong-royong. Hal tersebut tentunya sesuai dengan asas pembangunan di wilayah pedesaan. Sebagian besar masyarakat Desa Waimatakabo melakukan kegiatan dengan gotong-royong, hal tersebut selain menghemat biaya yang dikeluarkan untuk upah tukang, gotong-royong juga dilakukan berdasarkan kesadaran partisipasi dari masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat menjadi pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Waimatakabo, adapun tabel pelaksana pembangunan Desa Waimatakabo yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Siswantara selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Program:

**Tabel 3. 9**

**Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Gotong-royong</b>	<b>Jasa Buruh Bangunan</b>
1	Dusun I	V	-
2	Dusun II	V	-
3	Dusun III	V	V
4	Dusun IV	V	-

*Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan dan Program Pemerintah Desa Waimatakabo pada tanggal 15 Mei 2017*

Hassan dalam wawancara 11 Mei 2017 mengatakan bahwa: “pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Waimatakabo berasal dari alokasi dana Desa yang dilakukan secara gotong royong



serta dilakukan oleh warga sendiri, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa memiliki tanggungjawab untuk memajukan desanya sehingga harus berpartisipasi dan ikut serta dalam pembangunan yang berasal dari Pemerintah Desa”.<sup>8</sup>

Kadir dalam wawancara 11 Mei 2017 mengatakan bahwa: “warga adalah pelaksana pembangunan, sehingga warga memiliki tanggungjawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan yang berasal dari Desa, tidak dengan tukang bangunan, tapi menggunakan kemampuan sendiri”.<sup>9</sup>

Proses pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Waimatakabo dilakukan langsung oleh masyarakat secara gotong-royong. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari masyarakat Pedesaan yang membangun wilayahnya secara gotong-royong. Masyarakat merupakan pelaksana utama dari pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara gotong-royong atau bahu membahu untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hassan dan Kadir pada 11 Mei 2017 selaku masyarakat Desa Waimatakabo.

Masyarakat Desa Waimatakabo tidak semua menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, sebab masih ada Dusun yang menggunakan jasa buruh bangunan dalam pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa. Masyarakat yang mengerjakan

---

<sup>8</sup> Hassan Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 11 Mei tahun 2017.

<sup>9</sup> Kadir Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 11 Mei tahun 2017.

pembangunan infrastruktur dengan jasa buruh bangunan umumnya pada masyarakat yang memiliki kesibukan dengan perkebunan dan persawahan serta peternakan, masyarakat di Dusun tersebut menggunakan jasa buruh bangunan untuk membangun pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa tetap dapat dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan jasa buruh bangunan antara lain pada yakni Dusun III mengingat bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan dominasi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya.

Pembangunan yang sedang berlangsung tentu memiliki sebuah kinerja, kinerja yang dimaksud merupakan kinerja seseorang dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Target pembangunan infrastruktur disusun pada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) ataupun Dusun. Target pembangunan disusun sebagai acuan dasar dalam proses pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung, dengan adanya target pembangunan maka masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Hendra dalam wawancara 11 Mei 2017 menyatakan bahwa: “gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus menetapkan target hariannya, sehingga setiap hari saat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai target yang harus diselesaikan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hendra Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 11 Mei tahun 2017.

Rencana penyusunan target pembangunan infrastruktur memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan, sehingga target pembangunan yang disusun dapat sesuai dengan realisasinya. Kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap wilayah Desa Waimatakabo dapat sebagai penentu pencapaian target pembangunan infrastruktur, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang baik, tentunya dapat melaksanakan pembangunan dari Pemerintah Desa dengan maksimal, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hendra selaku masyarakat Desa Waimatakabo yang menjadi pelaksana utama dalam pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo. Target pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo pada tahun 2015 antara lain terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 10**  
**Target Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Tahun**  
**Anggaran 2015**

No	Kegiatan	Lokasi	Target Volume Pembangunan
1	Pembangunan Jalan Desa	Dusun I Rt. 2	1.200 m
2	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun II Rt. 3	1 Unit
3	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun II Rt. 4	1 Unit
4	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun III Rt. 5	1 Unit
5	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun III Rt. 6	1 Unit

6	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun IV Rt. 7	1 Unit
7	Pembangunan Gorong-Gorong	Dusun IV Rt. 8	1 Unit

*Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Waimatakabo Tahun 2015*

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat jenis pembangunan, dan lokasi pembangunan serta target volume pembangunan. Hal ini tentunya membutuhkan target penyelesaian yang baik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo.

Kinerja masyarakat Desa Waimatakabo dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dengan berbagai macam. Mulai dari masyarakat yang tidak menetapkan target kinerja hariannya, dan masyarakat yang menetapkan target kinerja hariannya. Target kinerja harian merupakan sebuah target atau capaian yang akan diselesaikan per-hari pelaksanaan pembangunan. Target kinerja harian yang tidak ditetapkan maka pembangunannya hanya sesuai dengan keadaan dan kondisi dari pekerja serta meterial pembangunan atau pelaksana pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, pembangunan yang tidak menetapkan kinerja hariannya memiliki arti pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan atau ditetapkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam memperkirakan penyelesaian sebuah pembangunan infrastruktur yang dilaksanakannya. Selain itu, dengan tidak adanya penetapan kinerja harian, sehingga biaya yang digunakan tidak dapat

digunakan secara efektif dan efisien. Hal yang disebabkan dari pembangunan yang menggunakan jasa buruh bangunan dan masyarakat setempat tidak menetapkan target kinerja harian, maka dapat dipastikan biaya operasional untuk jasa buruh bangunan akan membesar. Sedangkan target kinerja harian yang ditargetkan berisi berapa volume bangunan yang akan diselesaikan per-hari, dengan ditetapkannya target harian tersebut maka masyarakat dapat memprediksi berapa lama proses pembangunan infrastruktur akan berlangsung, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat sesuai dengan target atau terukur serta terstruktur.

Nurgiono dalam wawancara 10 Mei 2017 mengatakan bahwa: “pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara gotong-royong dan menggunakan jasa buruh bangunan mempunyai kinerja pembangunan yang berbeda. Pembangunan yang dilaksanakan masyarakat dengan gotong-royong mempunyai kinerja yang efektif dan efisien daripada masyarakat yang membangun dengan menggunakan jasa buruh bangunan. Nurgiono menegaskan bahwa pembangunan secara gotong-royong masih sering dilakukan pada Desa Waimatakabo”.<sup>11</sup>

### **3. Evaluasi Keluaran Pembangunan**

Evaluasi keluaran pembangunan berfungsi untuk mengukur dan menilai keluaran dari sebuah pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana serta akibat atau pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana. Dalam pembahasan penelitian evaluasi keluaran pembangunan yang digunakan adalah dengan menilai hasil dari sebuah

---

<sup>11</sup> Nurgiono Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei tahun 2017.

pembangunan, pengaruh serta akibat dari sebuah pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo yang telah terlaksana pada tahun 2015.

Kondisi ataupun keadaan masyarakat, kebutuhan pembangunan masyarakat, dan pelaksana pembangunan, serta kinerja sebuah pembangunan tentunya mempengaruhi hasil dari sebuah pembangunan khususnya infrastuktur. Hasil pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo merupakan capaian dari kebutuhan masyarakat Desa Waimatakabo, dimana masyarakat berperan serta terlibat langsung dalam partisipasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakannya, sehingga masyarakat adalah penentu, pelaksana serta pengguna infratsruktur yang telah dilaksanakannya.

**Tabel 3. 11**

**Jenis, Lokasi, Target, Realisasi, dan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Tahun 2015**

No	Kegiatan	Lokasi	Target Volume	Realisasi Volume	Anggaran Dana
1	Jalan Desa	Dusun I Rt. 2	1.200 m	1.200 m	Rp. 140.480.000
2	Gorong-gorong	Dusun II Rt. 3	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300
3	Gorong-gorong	Dusun II Rt. 4	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300
4	Gorong-gorong	Dusun III Rt. 5	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300
5	Gorong-gorong	Dusun III Rt. 6	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300
6	Gorong-gorong	Dusun IV Rt. 7	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300

7	Gorong-gorong	Dusun IV Rt. 8	1 Unit	1 Unit	Rp. 16.640.300
Jumlah					Rp. 240.322.000

*Sumber: Dokumen Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015*

Saman dalam wawancara 12 Mei 2017 mengatakan bahwa: “hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tahun 2015 berorientasi pada target pembangunan yang telah ditetapkan, atau pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu dalam hal volume pembangunan, maupun kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga jika hasil dari pembangunan infrastruktur baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat baik itu secara gotong-royong ataupun dengan jasa buruh bangunan juga baik”.<sup>12</sup>

Ramli dalam wawancara 12 Mei 2017 mengatakan bahwa; “hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, manfaatnya juga sangat banyak kita rasakan. Hal ini karena kita sendiri yang menyusun kebutuhan pembangunan dan yang menjadi pelaksana pembangunan”.<sup>13</sup>

Hasil sebuah pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Waimatakabo pada tahun 2015 sesuai dengan permintaan masyarakat sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang menyusun kebutuhan pembangunan dan menjadi pelaksana utama dalam pembangunan itu sendiri, tentunya dengan gotong-royong serta menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sendiri seperti yang dikatakan oleh Ramli selaku masyarakat Desa Waimatakabo beliau merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat yang terlibat dalam perencana dan pelaksana pembangunan infrastruktur di Desa Waimatakabo.

<sup>12</sup> Saman Kepala Dusun II Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 12 Mei tahun 2017.

<sup>13</sup> Ramli Masyarakat Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 12 Mei tahun 2017.

Pembangunan Desa Waimatakabo pada setiap Dusun memenuhi target yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan Desa Waimatakabo, sehingga hasil pembangunan infrastruktur dapat dikatakan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi antar Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi masyarakat Desa Waimatakabo dalam pembangunan infrastruktur, baik itu dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksana pembangunan. Ketika masyarakat Desa Waimatakabo disibukkan dengan pekerjaannya, maka masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat yang mempunyai waktu luang dalam kesehariannya dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing.

Anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan volume pembangunan, pada tabel 3.11 tentang jenis, lokasi, target, dan realisasi, serta anggaran dana pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo tahun 2015 digambarkan dengan rinci bagaimana realisasi dari target yang telah ditetapkan pada sebuah pembangunan. Target pembangunan infrastruktur menentukan anggaran dana yang digunakan pada setiap pembangunan, sehingga jika target sesuai dengan realisasi, maka dapat dipastikan anggaran dana yang digunakan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Suatu pembangunan infrastruktur yang telah



selesai dilaksanakan mempunyai pengaruh atau akibat bagi masyarakat yang merasakan secara langsung hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut, sebab pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur yang ada pada tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Dusun yang berkenaan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan pada Desa Waimatakabo adalah pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang dilaksanakan tidak lepas dari partisipasi masyarakat serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

**Tabel 3. 12**

**Jenis Pembangunan Berdasarkan Keadaan dan Kondisi Wilayah per Dusun Desa Waimatakabo Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Keadaan Wilayah</b>	<b>Jenis Pembangunan</b>
1	Dusun I	456	Tanah Datar, Persawahan, Perkebunan, Peternakan, Pemukiman	Pembangunan Jalan Desa
2	Dusun II	351	Tanah Datar, Persawahan, Pemukiman	Pembangunan Gorong-gorong

3	Dusun III	312	Tanah Datar, Perkebunan, Peternakan, Pemukiman	Pembangunan Gorong-gorong
4	Dusun IV	336	Tanah Datar, Pemukiman, Persawahan.	Pembangunan Gorong-gorong

*Sumber: Dokumen Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2015*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa merupakan pelaksana pembangunan infrastruktur, tentunya pelaksana lapangan pembangunan infrastruktur adalah pelaksana dengan usia produktif dan berjenis kelamin laki-laki yang kompeten terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Keadaan wilayah merupakan penentu dari jenis pembangunan yang akan dilaksanakan serta pembentukan prioritas pembangunan, dan pada pelaksanaannya prioritas pembangunan ini terbagi atas dua jenis pembangunan infrastruktur.

Asep Aidin dalam wawancara 9 Mei 2017 mengatakan bahwa: “akibat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo tahun 2015 telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, karena yang akan merasakan manfaat pembangunan infrastruktur adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaat dari sebuah pembangunan infrastruktur mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Waimatakabo”.<sup>14</sup>

Pengaruh atau akibat dari pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan jalan desa dan gorong-gorong. Pembangunan jalan desa

<sup>14</sup> Asep Aidin Kaur Pembangunan Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 9 Mei tahun 2017.

sangat dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat Dusun I dan Dusun II, dimana pembangunan jalan desa tersebut merupakan pembangunan Dusun I Dengan Dusun II dan dijadikan sebagai jalan akses para petani untuk mengakses hasil panennya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut, masyarakat merasa lebih mudah untuk mengangkut hasil panennya ke rumah masing-masing ataupun gudang yang telah disediakan.

Pembangunan gorong-gorong menjadi pembangunan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV, mengingat kontur tanah yang rendah dari Dusun I. Sehingga ketika musim penghujan tiba, masyarakat yang berada di wilayah Dusun Desa Waimatakabo mengalami banjir serta kesulitan dalam mengakses hasil panennya. Pembangunan gorong-gorong merupakan pembangunan yang sesuai dan tepat sasaran di Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV dengan melihat keadaan ataupun kondisi di wilayahnya.

Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo didapatkan dengan cara memilih pembangunan yang telah disusun pada tingkat Dusun, adapun pembangunan pada tingkat Dusun yang tidak menjadi prioritas pembangunan Desa Waimatakabo pada tahun 2015 antara lain:

**Tabel 3. 13**  
**Jenis Pembangunan Yang Tidak Terlaksana**

No	Jenis Pembangunan
1	Fasilitasi Gedung Paud

2	Fasilitas Gedung TK
3	Pembangunan Jalan

*Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Waimatakabo Tahun 2016.*

Pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana pada tahun 2015 dijadikan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo pada tahun selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang ada di Desa Waimatakabo dapat memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

### **C. Kendala Pembangunan Infrastruktur Desa Waimatakabo Tahun 2015**

Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Waimatakabo tahun 2015 tidak terlepas daripada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waimatakabo terdiri dari beberapa macam. Adapun faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastuktur Desa Waimatakabo pada tahun 2015 menurut Abdul Manaf dan Asep Aidin antara lain:

1. Perbedaan tingkat kesibukan kesibukan yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Sutikno dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2017 menuturkan bahwa tingkat kesibukan masyarakat yang ada di Desa Waimatakabo terbagi menjadi dua, ada yang bekerja sebagai buruh dan yang mengurus pertanian, perkebunan, serta peternakan. Masyarakat yang tingkat kesibukannya memiliki ladang pertanian, perkebunan, serta peternakan cenderung rendah dalam berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat dengan kesibukan sebagai buruh sangat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sutikno Kepala Dusun III Desa Waimatakabo, *Wawancara*, pada tanggal 14 Mei tahun 2017.

Partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat sangat mempengaruhi dan bahkan menghambat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan, perencanaan pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat tersebut, sedangkan pelaksana pada sebuah pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang akan bekerja baik itu dengan gotong-royong atau dibantu tenaga pokok, maupun pembangunan yang dilaksanakan secara gotong-royong secara penuh oleh masyarakat setempat. Pembangunan yang tidak ada partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi, keadaan atau kebutuhan pada masyarakat tersebut, sehingga manfaat dari sebuah pembangunan infrastruktur tidak dirasakan secara maksimal.

## 2. Kinerja buruh bangunan

Pemerintah Desa Waimatakabo memberikan kewenangan kepada masyarakat di tingkat Dusun dan Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa memberikan anggaran untuk jasa buruh bangunan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Waimatakabo dengan memperhatikan swadaya dan swakarsa yang dimiliki oleh masyarakat. Mengingat masyarakat Desa Waimatakabo mempunyai tanggungjawab didalam mata pencahariannya masing-masing, maka

pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara setiap hari diberi anggaran untuk jasa buruh bangunan, tetapi penganggaran pembangunan diserahkan kembali kepada masyarakat, apakah semua pekerja pembangunan infrastruktur menggunakan jasa buruh bangunan, atau menggunakan partisipasi masyarakat secara gotong-royong.

Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong atau menggunakan jasa buruh bangunan mempunyai kinerja yang berbeda. Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong oleh masyarakat setempat akan menetapkan target dari sebuah pembangunan, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, hal ini dilakukan agar dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dapat efektif dan efisien. Sedangkan pada pelaksana pembangunan dengan jasa buruh bangunan, kinerja pelaksanaannya tidak menetapkan target, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, sebab yang mereka ketahui hanyalah bekerja menyelesaikan sebuah pembangunan, dan tidak memperhatikan anggaran dana yang digunakan dalam sebuah pembangunan infrastruktur.